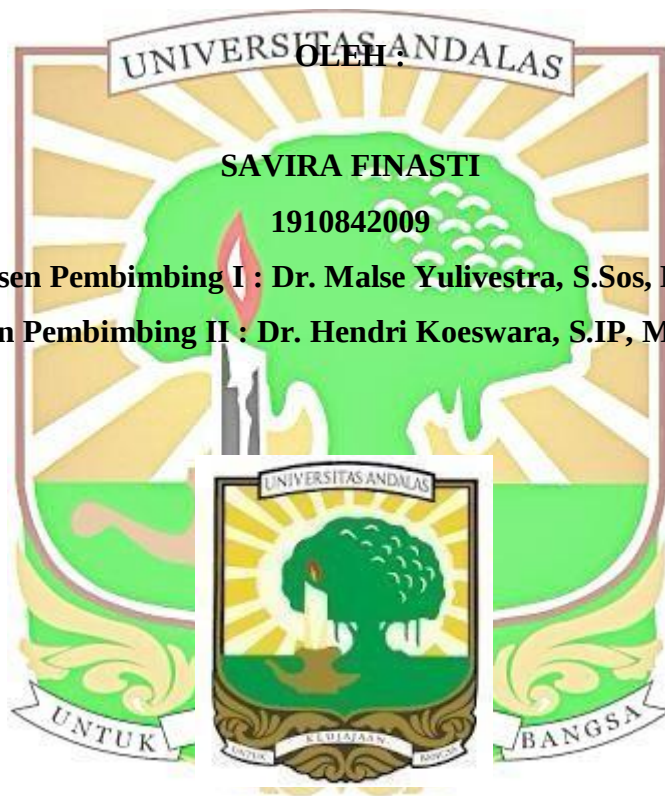


**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi
Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



OLEH :

SAVIRA FINASTI

1910842009

Dosen Pembimbing I : Dr. Malse Yulivestra, S.Sos, M.AP

Dosen Pembimbing II : Dr. Hendri Koeswara, S.IP, M.Soc.Sc

**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2025

ABSTRAK

Savira Finasti, Nomor BP 1910842009, Implementasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2025, dibimbing oleh : Dr. Malse Yulivestra, S.Sos, M.AP dan Dr. Hendri Koeswara, S.IP, M.Soc, Sc.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh reformasi birokrasi perizinan berusaha di Indonesia, yang mengalami transformasi signifikan dari pendekatan berbasis izin konvensional menuju sistem perizinan berusaha yang didasarkan pada tingkatan risiko usaha. Pendekatan ini memungkinkan pelaku usaha untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin lainnya sesuai tingkatan risiko usaha mulai dari tingkatan rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data. Teori implementasi kebijakan yang digunakan adalah teori implementasi Merilee S, Grindle yang diukur melalui dua variabel yaitu *Content of Policy* (Isi Kebijakan) dan *Context of Implementation* (Lingkungan Implementasi).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat telah mampu menerapkan kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko yang mengklasifikasikan kegiatan usaha berdasarkan tingkatan risiko usaha. Dalam pelaksanaannya, pelayanan perizinan berusaha sudah menunjukkan kemajuan secara signifikan dalam memberikan kemudahan perizinan bagi pelaku usaha meskipun, dari segi sumber daya, masih diperlukan peningkatan kualitas pelayanan perizinan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan dalam proses perizinan berusaha berbasis risiko.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

ABSTRACT

Savira Finasti, BP Number 1910842009, Implementation of Risk-Based Business Licensing Policy at DPMPTSP of West Sumatra Province, Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang, 2025, supervised by: Malse Yulivestra, S.Sos, M.AP and Dr. Hendri Koeswara, S.IP, M.Soc, Sc.

This study aims to describe and analyze how the implementation of the Risk-Based Business Licensing Policy at DPMPTSP of West Sumatra Province. This research is motivated by the bureaucratic reform of business licensing in Indonesia, which has undergone a significant transformation from a conventional permit-based approach to a business licensing system based on business risk levels. This approach allows business actors to obtain a Business Identification Number (NIB) and other permits according to the level of business risk ranging from low, medium low, medium high, and high.

This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The selection of informants was carried out using the purposive sampling method, with data validity techniques using data source triangulation. The policy implementation theory used is the Merilee S. Grindle implementation theory which is measured through two variables, namely Content of Policy and Context of Implementation.

The results of this study indicate that the DPMPTSP of West Sumatra Province has implemented a risk-based business licensing policy that is able to classify business activities based on the level of business risk. In its implementation, business licensing services have shown significant progress in providing licensing facilities for business actors, although, in terms of resources, it is still necessary to improve the quality of licensing services in order to increase efficiency, transparency, and ease in the risk-based business licensing process.

Keywords: Public Policy, Policy Implementation, Risk-Based Business Licensing